

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo, 2004.
- Asmara, Galang. *Kedudukan Ombudsman dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2016.
- Boediono, B. *Pelayanan Prima Perpajakan*, Jakarta : Rineka Cipta, 2003.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedi, 1982.
- Basiang, Martin *The Contemporary Law Dictionary*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2016.
- Dwiyanto, Agus. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*, Yogyakarta: UGM Press, 2005.
- Efendi, A'an dan Freddy Poernomo, *Hukum Administrasi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017
- Estiningsih, Mudji. *Fungsi Pengawasan Ombudsman Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik (Studi Kasus Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta)*, Yogyakarta: Liberty, 2016.
- Fachruddin, Irfan. *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*, Bandung: Alumni, 2004.
- Fahmal, A. Muin. *Peran Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Layak Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih*, Yogyakarta: UII Press, 2006.
- Gie, The Liang Gie, *Ensiklopedia Administrasi*, Jakarta: Gunung Agung, 1993.
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*, Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987.
- Hadjon, Philipus M et.al. *Pengantar Hukum Adrnistrasi Indonesia*, Cetakan Ke-11, Yogyakarta: UGM Press, 2011.
- Hague, Rod and Martin Harrop. *Comparative Government and Politics: An Introduction* New York: Palgrave, 2001.

- Hakim, Abdul Aziz. *Negara Hukum dan Demokrasi Di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Handoyo, B. Hestu Cipto. *Hukum Tata Negara Indonesia Menuju Konsolidasi Sistem Demokrasi*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2015.
- Harjono, *Konstitusi sebagai Rumah Bangsa*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008.
- Hartono, CFG. Sunaryati. *Ombudsman Sebagai Lembaga Penegak Hukum dan Pembela Hak Asasi Manusia*, Makalah disampaikan di Seminar tentang: Fungsi Ombudsman dalam Negara Demokrasi, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman, Jakarta, 23-24 Agustus, 1999.
- Hartono, CFG. Sunaryati, et.al. *Panduan Investigasi untuk Indonesia*, Jakarta: The Asia Foundation Indonesia, 2003.
- HR, Ridwan. *Tiga Dimensi Hukum Administrasi dan Peradilan Administrasi*, Yogyakarta: FH UII Press, 2009.
- HR, Ridwan. *Hukum Administrasi di Daerah*, Yogyakarta: FH UII Press, 2009.
- HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Rajawali Press, 2017.
- HR, Ridwan dan Nurmalita Ayuningtyas Harahap. *Hukum Kepegawaian*, Yogyakarta: UII Press, 2018.
- Ibrahim, Johnny. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2012.
- Ibrahim, Jimmi Mohamad. *Prospek Otonomi Daerah, Dalam Rangka Memberikan Peranan yang lebih besar Kepada Pemerintah Daerah*, Semarang, Dahara Prize, 1991.
- Indroharto. *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku II Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2005.
- Jeddawi, Murtir. *Reformasi Birokrasi Kelembagaan dan Pembinaan PNS*, Yogyakarta: Total Media, 2008.
- Komisi Ombudsman Nasional, *Peranan Ombudsman Dalam Rangka Pemberantasan Dan Pencegahan Korupsi Serta Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Bersih*, Jakarta: Komisi Ombudsman Nasional, 2005.

- Kusnardi Moh. dan Bintan R.Saragih, Ilmu Negara, Jakarta: Gaya Media Pratama, 1995.
- Lotulung, Paulus Effendie. *Beberapa Sistem Tentang Kontrol Segi Hukum terhadap Pemerintah*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.
- Manan, Bagir Manan. *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Yogyakarta: Pusat Studi Hukum FH UII, 2001.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-12, Jakarta: Kencana, 2016.
- Masthuri, Budhi. *Mengenal Ombudsman Indonesia*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2005.
- Marbun, S.F. *Hukum Administrasi Negara II*, Yogyakarta: FH UII Press, 2013.
- Marbun, S.F. *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia*, Cetakan Kelima, Yogyakarta: FH UII Press, 2015
- Mertokusumo, Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2008.
- Muchsan, *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan PTUN di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2000.
- Mochtar, Zainal Arifin. *Lembaga Negara Independen: Dinamika Perkembangan dan Urgensi Penataannya Kembali Pasca Amandemen Konstitusi*, Jakarta: Rajawali Press, 2017.
- Nurtjahjo, Hendra et.al. *Memahami Maladministrasi*, Jakarta: Ombudsman Republik Indonesia, 2013.
- Nasution, Bahder Johan. *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Bandung: Mandar Maju, 2014.
- Pane, Nina. *Adnan Buyung Nasution: Nasihat Untuk SBY*, Jakarta: Kompas, 2012.
- Partanto, Pius A dan M. Dahlan Al Barry. *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Arkola, 2001.
- Puspitosari, Hesti et.al. *Filosofi Pelayanan Publik, Buramnya Wajah Pelayanan Menuju Perubahan Paradigma Pelayanan Publik*, Malang: Setara Press, 2011.

- Projodikoro, Wirjono. *Azas-Azas Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Penerbit Dian Rakyat, 1983.
- Rahardjo, Satjipto. *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publising, 2009.
- Rasjid, M. Ryass. *Desentralisasi dalam Menunjang Pembangunan Daerah dalam Pembangunan Administrasi di Indonesia*, Jakarta: Pustaka LP3ES, 1998.
- Sirajuddin, et. al, *Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah*, Malang: Setara Press, 2016.
- Situmorang, Victor M. dan Jusuf Juhir. *Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1994.
- Sinambela, Lijan Poltak. *Reformasi Pelayanan Publik : Teori, Kebijakan dan Implementasi*, Jakarta: Bumi Aksara, 2014.
- Sipayung, P.J.J. *Pejabat Sebagai Calon Tergugat Dalam Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta: Sri Rahayu, 1989.
- Soekanto, Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 2016.
- Sujamto, *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.
- Sujata, Antonius. *Ombudsman Indonesia; Masa Lalu, Sekarang, dan Masa Mendatang*, Jakarta: Komisi Ombudsman Nasional, 2002.
- Taufiqkohman, *Optimalisasi Peningkatan Investigasi Ombudsman Republik Indonesia Guna Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik*, Jakarta: Penerbit Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Prof. Dr. Moestopo Beragama, 2015.
- Tjandra, W. Riawan. *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Tjandra, W. Riawan. *Peradilan Tata Usaha Negara, Mendorong Terwujudnya Pemerintah Yang Bersih dan Berwibawa*, Yogyakarta: Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2009
- Usman, Rachmadi. *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2013.

Yamin, Muhammad. *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.

Yunas, Didi Nazmi. *Konsepsi Negara Hukum*, Padang: Angkasa Raya Padang, 1992.

Wahidin, Samsul. *Politik Penegakan Hukum Di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.

Widodo, Joko. *Good Governance*, Insan Cendikia: Surabaya, 2001.

## **B. Jurnal, Majalah, Makalah, Koran, Tesis dan Disertasi**

Ampera, M. Kapitra, Disertasi, *Implementasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau dalam melaksanakan Peran dan Fungsi Pada Anggaran Legislatif Untuk Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik (Good Governance)*, Program Doktor Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2016.

Asshiddiqie, Jimly. *Gagasan Negara Hukum*, Makalah.

Dewi, Dyah Adriantini Sintha. *Budaya Hukum Pejabat Publik dalam Pelaksanaan Rekomendasi Ombudsman*, Makalah di sampaikan pada Seminar Nasional Hasil-Hasil Penelitian dan Pengabdian LPPM Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Sabtu, 26 September 2015.

Diamandouros, P. Nikiforos *The Ombudsman Institution and the Quality of democracy*, distinguished speakers lectures No. 3/2006, this lecture was held on the inauguration of the Graduate school in political science, university of siena Academic year 2006/2007, Siena, october 17, 2006.

Fahmi, Sudi. *Konsistensi Pengaturan Penyerahan Kewenangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Dalam Pemberian Izin Pemanfaatan Hasil Hutan (Studi Desentralisasi Bidang Kehutanan Di Propinsi Riau)*, Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2006.

Faizun, Atik Nur. *Fungsi Ombudsman dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pada Bidang Pendidikan di Kota Surabaya*, <file:///C:/Users/user/Downloads/1265-3088-1-SM.pdf>.

Hakim, Adhar. *Fungsi Dan Peran Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Nusa Tenggara Barat Dalam Mendorong Kepatuhan Pemerintah Daerah*

*Terhadap Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik*, Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan.

Haposan Siallagan, *Penerapan Prinsip Negara Hukum di Indonesia*, Jurnal Sosiohumaniora, Volume 18 Nomor. 2 Juli 2016.

Harijanti, Susi Dwi. *Komisi Ombudsman Nasional: Problem dan Prospek*, Jurnal Hukum. No. 21 Volume 9, September 2002.

Hasyim, Moh. *Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih Dengan Ombudsman*, Jurnal Ombudsman, Edisi 8, 2010.

Marshall, Mary A. and Linda C.Reif *The Ombudsman: Maladministration and Alternative Dispute* Alberta Law Review, Volume XXXIV No I Tahun 1995.

Masduki, Teten Masduki. *Peranan Masyarakat dalam Pemberantasan Korupsi*, Makalah, disampaikan pada: Workshop on Good Governance, Kerjasama antara Universitas Utrecht dengan Fakultas Hukum Unair, Surabaya, Oktober 4-5, 2001.

Maleha Soemarsono, *Negara Hukum Indonesia Ditinjau Dari Sudut Teori Tujuan Negara*, Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun Ke-37 No.2 April-Juni 2007.

Muntoha, *Demokrasi dan Negara Hukum*, Jurnal Hukum No. 3 Vol. 16, 2009.

Pratiwie, Dinny Wirawan. *Urgensi Keberadaan Ombudsman Republik Indonesia Dalam Rangka Mewujudkan Good Governance (Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia)*, Jurnal Ilmiah Hukum, <https://journal.uwgm.ac.id/index.php/yuriska/search/search?simpleQuery=Dinny+Wirawan+Pratiwie+%E2%80%9CUrgensi+Keberadaan+Ombudsman+Republik+Indonesia+Dalam+Rangka+Mewujudkan+Good+Governance+%28Ditinjau+Dari+Undang-Undang+Nomor+37+Tahun+2008+Tentang+Ombudsman+Republik+Indonesia&searchField=query>.

Radjab, Abi Ma'ruf. *Kekuatan Mengikat Putusan Ajudikasi Ombudsman dalam Proses Penyelesaian Sengketa Pelayanan Publik*, Jurnal Veritas et Justitia, Volume. 1, Nomor 2.

Remac, Milan. *Standards of Ombudsman Assessment: A New Normative Concept?*, This article is published in a peer-reviewed section of the Utrecht Law Review.

Sendhikasari, Dewi. *Pengawasan Ombudsman Republik Indonesia Dalam Pelayanan Publik*, Majalah Info Singkat, Nomor 03, Volume. IX, 2017.

Setiawan, Adam *Realitas Penegakan Hukum*, Koran Republika dimuat 13 November 2018.

Setiawan, Adam. *Peran Ombudsman Dalam Mengawal Pelayanan Publik*, Harian Bhirawa, dimuat 18 April 2019.

Wahyudi, Rody et.al. *Perilaku Maladministrasi Birokrasi Dalam Pelayanan Publik di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau : Faktor Penyebab dan Solusinya*, Jurnal Administrasi Publik, Volume 12 Nomor 1, 2015.

Yasin, Muhamad Rus'an. *Telaah Tentang Rekomendasi Ombudsman Terhadap Fraud Perbankan*, Jurnal Katalogis, Volume.4 Nomor.11, Vol. 4, 2016.

#### **A. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pembentukan, Susunan, Dan Tata Kerja Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Di Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2011 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5207)

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041).

Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penerimaan, Pemeriksaan dan Penyelesaian Laporan. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1035)

Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tentang Pedoman Standar Pelayanan Nomor : 15 Tahun 2014, Tanggal 2 Mei 2014.

Lampiran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

## **B. Wawancara**

Wawancara dengan Jaka Susila Wahyuana, Keasistenan Pemeriksaan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta, 22 Januari 2019.

Wawancara dengan Tri Lindawati, Anggota Unit Kerja Keasistenan Bidang Pencegahan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah, 20 Februari 2019.

Wawancara dengan Rio, Kepala Keasistenan Pemeriksaan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Kalimantan Timur, 13 Maret 2019.

Wawancara dengan Mohammad Firhansyah, Tim Pencegahan Maladministrasi Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Kalimantan Selatan, 15 Maret 2019.

## **C. Internet**

Asshiddiqie Jimly, “Penegakan Hukum”, <http://www.solusihukum.com/artikel/artikel49.php>, diakses 13 Agustus 2018.

Bisnis.com, <https://teknologi.bisnis.com/read/20170515/105/653824/kemenkominfo-abaikan-rekomendasi-ombudsman>, “Kemenkominfo Abaikan Rekomendasi Ombudsman”, diakses 15 Mei 2017.



- Datariau, <http://datariau.com/nasional/Rekomendasi-Ombudsman-Tidak-Dipatuhi-Pemerintah-Daerah> “Rekomendasi Ombudsman Tidak Dipatuhi Pemerintah Daerah”, diakses, 08 Februari 2017.
- Detik.com, Ratna Sari Dewi Asisten Ombudsman RI Pusat “19 Tahun Ombudsman, Menuju Pelayanan Publik Prima”, <https://news.detik.com/kolom/d-4463476/19-tahun-ombudsman-menuju-pelayanan-publik-prima>, diakses, 12 Maret 2019.
- DetikNews, <https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-3330136/ombudsman-ri-keluhan-buruknya-layanan-pemda-paling-tinggi>, “Ombudsman akan Tegur Ahok karena Tak Jalankan Rekomendasi” diakses, 5 Mei 2015.
- Kabar Perwakilan, “Ombudsman Dorong Kepala Daerah Komitmen Selenggarakan” SPP<http://ombudsman.go.id/perwakilan/news/r/pwk--ombudsman-dorong-kepala-daerah-komitmen-selenggarakan-spp>, diakses 16 April 2019.
- Kemendagri, <https://www.kemendagri.go.id/blog/25577-Pemberhentian-Sementara-Bupati-Talaud-Telah-Sesuai-Aturan>, “Pemberhentian Sementara Bupati Talaud Telah Sesuai Aturan”, diakses 15 Januari 2018.
- Kompasiana, [https://www.kompasiana.com/danielht/Rekomendasi-ombudsman-ri-tentang-kasus-gki-yasmin-bogor-apakah-akan-mampu-mengembalikan-hak-jemaat-untuk-beribadah-di-gerejanya\\_55010839a333118d73512658](https://www.kompasiana.com/danielht/Rekomendasi-ombudsman-ri-tentang-kasus-gki-yasmin-bogor-apakah-akan-mampu-mengembalikan-hak-jemaat-untuk-beribadah-di-gerejanya_55010839a333118d73512658), “Rekomendasi Ombudsman RI tentang Kasus GKI Yasmin, Bogor: Apakah mampu Mengembalikan Hak Jemaat Untuk beribadah di Gerejaanya”, diakses, 26 Juni 2015.
- Ombudsman Republik Indonesia, <http://www.ombudsman.go.id/>
- Ombudsman Republik Indonesia, <https://www.ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--ombudsman-serius-tegakkan-sanksi-administrasi>, “Ombudsman Serious Tegakkan Sanksi Administrasi”, diakses 4 April 2018.
- Republika, <https://republika.co.id/berita/koran/wawasan/ofa8sd28/prof-amzulian-rifai-ketua-ombudsman-republik-indonesia-Maladministrasi-adalah-awal-dari-korupsi>, “Prof Amzulian Rifai: Ketua Ombudsman Republik Indonesia: Maladministrasi adalah Awal dari Korupsi”, diakses 19 Oktober 2016.
- Republika, <https://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/17/01/10/ojpps335-kemdagri-ingatkan-sanksi-pemberhentian-pada-kepala-daerah>,

“Kemdagri Ingatkan Sanksi Pemberhentian pada Kepala Daerah”, diakses 10 Januari 2017.

Republika, <https://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/17/03/03/om7c3p284-masyarakat-belum-pahami-tugas-ombudsman>, “Masyarakat Belum Pahami Tugas Ombudsman”, diakses, 03 Maret 2017.

Tempo, <https://nasional.tempo.co/read/1068473/ombudsman-ingin-punya-tiga-tambahan-wewenang/full&view=ok>, “Ombudsman Ingin Punya Tiga Tambahan Wewenang” dikases 10 Maret 2018.

Tempo, <https://nasional.tempo.co/read/1068473/ombudsman-ingin-punya-tiga-tambahan-wewenang/full&view=ok>, “Ombudsman Ingin Punya Tiga Tambahan Wewenang” dikases 10 Maret 2018.

Tirto.id, <https://tirto.id/mungkinkah-rekomendasi-ombudsman-berhentikan-anies-baswedan-cGPQ>, “Mungkinkah Rekomendasi Ombudsman Berhentikan Anies Baswedan” diakses 27 Maret 2018.

Tribunnews, <http://www.tribunnews.com/bisnis/2017/05/15/alamsyah-tuding-menkominfo-abaikan-rekomendasi-ombudsman> “Alamsyah Tuding Menkominfo Abaikan Rekomendasi Ombudsman”, diakses 15 Mei 2017.

sublibrary.com <https://www.sublibrary.com/view?t=II+.+TINJAUAN+PUSTAKA+2.1.+Konsep+Pelayanan+Publik+2.1.1+...&u=http%3A%2F%2Fdigilib.unila.ac.id%2F3035%2F16%2FBAB%25202.pdf>.